



PERUBAHAN

RENCANA KERJA 2021

**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN**



Jl. Ardiyasa No 17 Kompleks Pasar Parigi
Pangandaran
website www.disdagkop.pangandarankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM

Jl. Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) Tlp/fax. (0265) 2641122 Parigi 46393 PANGANDARAN
website: disdagkop.pangandarakab.go.id e-mail: dpkumkm.pangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts- 343/Disdagkop/2020

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

KEPALA PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 360 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
- : b. bahwa Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2018 Nomor 80);
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62);
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM yang selanjutnya disebut Disdagkop UMKM adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang

merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan koperasi UMKM dan perdagangan di Kabupaten Pangandaran.

2. Kepala Disdagkop UMKM adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Disdagkop UMKM.
3. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Disdagkop UMKM adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
4. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Renja Disdagkop UMKM adalah dokumen perencanaan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Dan Kegiatan

IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

Lampiran

BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA
Pasal 3

Isi beserta uraian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Renja Disdagkop UMKM Tahun 2021 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Disdagkop UMKM Tahun 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Disdagkop UMKM ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdagkop UMKM.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 17 November 2020

KEPALA PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN,



Drs. TEDI GARNIDA, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19680728 199303 1 008

Tembusan yth.:

1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran 2016-2021 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan dan koperasi UMKM selama periode 2016-2021 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan dan koperasi UMKM. Rencana Kerja (Renja) ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2021). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada akhir tahun anggaran 2020.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan dan koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 27 Agustus 2020

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. TEDI GARNIDA, MM
NIP. 19680728 199303 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan.....	7
1.4 Sitematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan	44
3.1.1 Kebijakan Nasional.....	44
3.1.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	45
3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
3.2.1 Rencana Strategis.....	48
3.2.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	48
3.2.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .	49
3.2.1.3 Strategi	50
3.2.1.4 Arah Kebijakan	50



3.3	Program dan Kegiatan	51
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	52
BAB V	PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran	10
Tabel 2.2	T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran	28
Tabel 2.3	T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2020 Kabupaten Pangandaran	32
Tabel 2.4	T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Pangandaran	40
Tabel 2.5	T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun Kabupaten Pangandaran	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perencanaan Terintegrasi Misi 6	47
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan bagian integral dari sistem perencanaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pendukung pencapaian tujuan pemerintah. Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun melalui metode secara teknokratik, partisipatif, politik, top down dan bottom up sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid, komprehensif dan terintegrasi dari berbagai lini dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan berkelanjutan yakni :

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)**, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan akuntabel, diperlukan komitmen bersama untuk meraih Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan serapan aspirasi masyarakat bawah melalui mekanisme Musrenbang/des/Kel, Musrenbang Kecamatan. Hasil/Usulan Musrenbang tersebut ditindaklanjuti oleh PD untuk dipadukan dan diformulasikan dengan usulan PD yang akan dibahas dalam Forum Musrenbang Kabupaten (Musrenbang RKPD).

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2021 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);



22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2018 Nomor 80);
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62);
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah:

- Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.
- Penyesuaian Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2020 merupakan langkah adaptasi program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran antara lain adalah

- Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik secara terukur;
- Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dengan arahan strategis visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran;
- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dan Perdagangan maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Tahun 2021 ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Laporan hasil kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2019 diambil dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) yang merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Hasil kinerja program / kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019 telah memenuhi target. Walaupun ada beberapa program / kegiatan yang kurang dari target, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai adalah baik. Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja 2019:

Tabel 2.1 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar									
	PERDAGANGAN									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100	100	100	100,00	100	100	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	11.446 Surat	-	2.500	1.514	60,56	2.500	4.014	35,07
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	9 Rekening	-	3	3	100,00	3	6	66,67
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang berizin	18 Unit	-	2	2	100,00	9	11	61,11
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	9 Orang	-	1	1	100,00	1	2	22,22
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	9 Orang	-	1	1	100,00	2	3	33,33
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	110 Jenis	-	70	70	100,00	50	110	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	7 Jenis	-	7	7	100,00	5	7	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	21 Jenis	-	5	5	100,00	7	14	66,67
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	21 Unit	-	5	5	100,00	12	17	80,95
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	30 Jumlah Media	-	11	11	100,00	10	15	50,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12 Jenis	-	4	4	100,00	4	12	100,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	430 Kali	-	120	120	100,00	140	144	33,49
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	420 Kali	-	-	-	-	-	120	28,57
	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi	Jumlah SDM Pengemudi	3 Orang	-	1	1	100,00	1	1	33,33
	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Penyediaan Jasa Publikasi	3 Orang	-	-	-	-	-	1	33,33
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100	100	100	100,00	100	100	100,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional	36 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	30 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 Gedung Kantor	-	2	2	100,00	2	2	66,67
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	3 Jumlah Mobil	-	1	1	100,00	1	2	66,67
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	15 Jumlah Mobil/Motor	-	7	7	100,00	7	14	93,33
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	3 Jumlah Gedung	-	2	2	100,00	7	2	66,67
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Website SKPD	Jumlah Website SKPD yang dipelihara rutin/berkala	3 Jumlah Web	-	-	-	-	-	-	-
	Penyewaan Tanah/Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan	3 Jumlah Gedung	-	2	2	100,00	3	2	66,67
	Pembangunan Gedung Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Jumlah Gedung Kantor yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100	100	100	100,00	100	100	100,00
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	240 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	240 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100	100	100	100,00	100	100	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti	15 Orang	-	-	-	-	15	15	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti	120 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti	150 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	100 %	100	100	100	100,00	100	100	100,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 Dokumen	-	3	3	100,00	3	6	66,67
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	6 Dokumen	-	2	2	100,00	2	4	66,67
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3 Dokumen	-	1	2	200,00	1	3	100,00
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	6 Dokumen	-	6	6	100,00	6	6	100,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sistem	3 Jumlah Sistem	-	1	1	100,00	1	2	66,67
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah Sistem	3 Jumlah Sistem	-	1	1	100,00	1	2	66,67
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sistem	3 Jumlah Sistem	-	1	1	100,00	1	2	66,67
	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Revisi Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem	3 Jumlah Sistem	-	-		-	-	-	-
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha yang tertib niaga	55 %	50	50	50	100,00	52	52	94,55
	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah koordinasi	8 Kali	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Barang dan Jasa yang diawasi peredarannya	60 Barang	-	20	20	100,00	10	30	50,00
	Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta yang mengikuti	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Operasi Pasar Murah (OPM)	Jumlah paket yang disediakan	15.000 Paket	-	7.000	7.000	100,00	5.000	12.000	80,00
	Pendataan dan Pemantauan Barang Bersubsidi (LPG, BBM dan Pupuk)	Jumlah Dokumen	9 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kemetrolagian	Jumlah peserta yang mengikuti	25 orang	-	-	-	-	5	5	20,00
	Pendampingan Tera/Tera Ulang serta pengawasan BDKT	Jumlah alat yang ditera	15.000 unit	-	5.500	5.500	100,00	1.500	7.000	46,67
	Pendataan dan Monitoring Toko Swalayan	Jumlah Dokumen	6 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pemahaman Undang-undang Tentang Cukai Ilegal	Jumlah peserta yang mengikuti	3.600 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Kemetrolagian (DAK)	Jumlah Kendaraan Kemetrolagian	5 Unit	-	5	5	100,00	5	5	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah permasalahan yang diselesaikan	11 Kasus	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Pengawasan Kemetrolagian	Jumlah Kendaraan Pengawasan Kemetrolagian	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Kemetrolagian (DAK)	Jumlah Peralatan Kemetrolagian	1 Paket	-	1	1	100,00	1	1	100,00
	Pembangunan Gedung UPT Kemeterologian Daerah	Jumlah Gedung yang dibangun	- unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan tanah untuk sarana UPT Kemetrolagian Daerah	Luas tanah yang disediakan	- lokasi	-	-	-	-	-	-	-
	Tera Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Banprov)	Jumlah alat tera yang disediakan	- Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidi Operasi Pasar Murah (OPM) (Banprov)	Jumlah Paket OPM yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan DED sarana Gedung Kemetrolagian Daerah	Jumlah Dokumen	- dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan/Pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi Pedagang (DBHCHT)	Jumlah peserta yang mengikuti	1.200 Orang	-	-	-	-	1.200	1.200	100,00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan Ekspore	19,00 %	12,00	4,50	4,50	100,00	-	16,50	86,84
	Promosi Produk-produk Unggulan	Jumlah Produk yang dipromosikan	16 Jenis	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Standar Mutu Produk (SNI)	Jumlah Peserta	100 Orang	-	-	-	-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta	1.050 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Pengelolaan Komoditas Ekspor dan Produk Olahan (DBH-CHT)	Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Komoditas Ekspor dari Produk Olahan	Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Pengelolaan Komoditas Ekspor dan Produk Unggulan (DBH-CHT)	Jumlah Pelatihan Pengolahan Komoditas Ekspor dari Produk Unggulan	Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan/Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)	Jumlah Pembinaan/Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)	Orang	-	1.000	1.000	100,00	-	1.000	-
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL dan Pedagang Asongan yang dibina	4.250 2700	2.600	1.389		-	-	2.600	61,18
	Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Objek Wisata yang diawasi	15 Objek Wisata	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Raperda Retribusi Pedagang Kakilima	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Pemindahan PKL Pantai Barat dan Timur	Jumlah PKL yang dipindahkan	1.466 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar	Prosentase Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	50,00 %	13,00	3,00	2,00	66,67	23.08	-	-
	Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah Pasar	1 Unit	-			-	-	-	-
	Sosialisasi Pembangunan Pasar Pananjung	Jumlah Peserta	- Orang	-			-	-	-	-
	Pendukung Revitalisasi Pasar	Jumlah Dokumen	- Dokumen	-	-	-	-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Revitalisasi Pasar	Jumlah Pasar	9 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Amdal Pasar	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	-			-	-	-	-
	Penyusunan DED Pasar	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	-			-	2	2	33,33
	Penyusunan UKL UPL Pasar	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	-			-	-	-	-
	Penyusunan Andal Lalin	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	-			-	-	-	-
	Pembangunan Relokasi Sementara Pedagang Pasar	Jumlah Lokasi Relokasi	3 Lokasi	-			-	-	-	-
	Pengawasan Pembangunan Relokasi Sementara Pedagang Pasar	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	-			-	-	-	-
	Pendataan Pedagang Pasar	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	-			-	-	-	-
	Pendataan Fasilitas Pasar	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	-			-	-	-	-
	Pembinaan Pedagang Pasar	Jumlah Pedagang yang dibina	3 Prdagang	-			-	-	-	-
	Review DED Revitalisasi Pasar	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	-			-	-	-	-
	Pendukung Pembangunan Relokasi Sementara Pedagang Pasar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-			-	1	1	100,00
	Pengaspalan Pasar Parigi	Jumlah Paket Pengaspalan	1 Paket	-			-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Revitalisasi Pasar (DAK)	Jumlah Pasar	2 lokasi	-	2	2	100,00	-	2	100,00
	Pendukung Revitalisasi Pasar	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	-	6	6	100,00	-	6	100,00
	Penegakan Perda Pasar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-			-	1	1	100,00
	Pendataan Pedagang Pasar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-			-	1	1	100,00
	KOPERASI DAN UKM									
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98,00 %	95,00	96,00	96,00	100,00	97,00	97,00	98,98
	Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Jumlah Promosi yang diikuti	3 Kali	-	3		-	4	3	100,00
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta	50 Orang	-			-	-	-	-
	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah Peserta	50 Pelaku UMKM	-		-	-	-	-	-
	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Peserta	90 Pelaku UMKM	-		-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monitoring	18 Kali	-		-	-	-	-	-
	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan	100 Pelaku UMKM	-	30	30	100,00	50	80	80,00
	Validasi dan Pemutakhiran Data UMKM	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	-		-	-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bintek Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta	90 Pelaku KUMKM	-		-	-	-	-	-
	Pendataan dan Penyusunan Profil UMKM	Jumlah Dokumen	30 Dokumen	-		-	-	-	-	-
	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sarana pemasaran yang dikembangkan	9 Unit	-			-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen kelembagaan Koperasi Pondok Pesantren	Jumlah Peserta	30 Orang	-		-	-	-	-	-
	Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu	Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang dibangun	1 Unit	-			-		-	-
	Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM	Jumlah Sarana pemasaran yang dikembangkan	1 Kali	-			-		-	-
	Sertifikasi SHAT	Jumlah Sertifikasi	30 Dokumen	-			-		-	-
	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Peserta	30 Orang	-			-		-	-
	Fasilitas Pameran Tingkat Lokal (DBHCHT)	Jumlah Peserta Pameran	100 Pelaku KUMKM	-			-	100	100	100,00
	Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM	Jumlah Peserta Pameran	50 Pelaku KUMKM	-			-	50	50	100,00
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	36,00 %	32,69	33,65	33,96	100,92	34,48	34,48	95,78
	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Peserta	120 Koperasi	-		-	-	-	-	-
	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi	195 koperasi	-	60	60	100,00	65	125	64,10



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi	40 dokumen	-	40	40	100,00	-	40	100,00
	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Administrasi Keuangan KSP / USP Koperasi	Jumlah Peserta	50 Koperasi	-			-	-	-	-
	Peningkatan SDM pengelola koperasi dan anggotanya	Jumlah Peserta	120 Koperasi	-		-	-	-	-	-
	Pemberdayaan dan peningkatan peran Dekopinda Kabupaten Pangandaran	Jumlah Peserta	195 Orang	-		-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi (5 Koperasi)	3 Koperasi	-		-	-	-	-	-
	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengelolaan Koperasi	Jumlah Peserta	50 Orang	-			-	-	-	-
	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Jumlah Petugas	2 Orang	-			-	-	-	-
	Penyelenggaraan pelatihan manajemen keuangan KSP/USP Koperasi	Jumlah Peserta	Koperasi	-		-	-	-	-	-
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK)	Jumlah fasilitasi dana peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM	132 Orang	-	132	132	100,00	-	132	100,00
	Pembangunan Kantor Dekopinda Kabupaten Pangandaran (Banprov)	Jumlah Gedung Kantor	Unit	-	1	-	-	-	-	-
	Desa Koperasi (Banprov)	Jumlah Desa Koperasi	Desa	-		-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan dan Pembinaan Koperasi	Jumlah Kendaraan	Unit	-		-	-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan dan Pelayanan Koperasi (Banprov)	Jumlah Kendaraan	Unit	-		-	-	-	-	-

1) Nilai AKIP Perdagangan dan Koperasi UMKM

Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2018 ditargetkan A dan realisasinya A. Nilai A ini dicapai untuk penilaian LAKIP periode tahun 2019.

Dalam Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2019 memiliki nilai 88,19.

Berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tabel berikut:

Peringkat	Nilai		Peringkat	Nilai
AA	>85-100		AA	>90-100
A	>75-85		A	>80-90
B	>65-75		BB	>70-80
CC	>50-65		B	>60-70
C	>30-50		CC	>50-60
D	0-30		C	>30-50
			D	0-30

maka Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2019 adalah Nilai 88,19 atau A.

2) Persentase Koperasi Aktif

Persentase Koperasi Aktif dapat dihitung menggunakan formula:

$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Seluruh Koperasi}} \times 100\%$$

Sebagaimana diketahui pada tahun 2019

Jumlah Koperasi = 212 Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif = 72 koperasi

$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{72}{212} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = 33,96\%$$

Persentase Koperasi Aktif adalah 33,96% dari 33,65% yang ditargetkan atau mencapai 100,92%.

Data Koperasi Aktif dapat dilihat di <http://nik.depkop.go.id/>



Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran di targetkan untuk mencetak Koperasi Sehat. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka di Kabupaten Pangandaran di Kabupaten Pangandaran terdapat 1 (satu) unit Koperasi Sehat yaitu KPRI Segar Jl. Raya Kalipucang no. 365 dengan hasil penilaian sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN	RASIO / NILAI	SKOR	Jumlah	Kategori
A	PERMODALAN: 1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 2 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko 3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri Terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	31,14% 280,94% 45,00%	3,00 6,00 3,00	12,00	SEHAT
B	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF: 1 Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap total/volume pinjaman diberikan 2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan 3 Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah 4 Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	99,95% 0,58% 1532,47% 13,12%	10,00 4,00 5,00 5,00	24,00	SEHAT
C	MANAJEMEN: 1 Manajemen Umum 2 Manajemen Kelembagaan 3 Manajemen Permodalan 4 Manajemen Aktiva 5 Manajemen Likuiditas	2,50 2,00 3,00 1,80 3,00	2,50 2,00 3,00 1,80 3,00	12,30	SEHAT
D	EFISIENSI 1 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto 2 Rasio Beban Usaha terhadap SIIU Kotor 3 Rasio Efisiensi Pelayanan	87,16% 79,78% 0,46%	4,00 2,00 2,00	8,00	SULIT
E	LIKUIDITAS 1 Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar 2 Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima	16,62% 89,08%	5,00 5,00	10,00	CUKUP SEHAT
F	KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN 1 Rasio Rentabilitas Aset 2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan	3,22% 6,72% 114,73%	0,75 3,00 4,00	7,75	SULIT
G	JATI DIRI KOOPERASI 1 Rasio Partisipasi Bruto 2 Rasio Promosi Ekonomi Anggota	100,00% 11,37%	7,00 3,00	10,00	SEHAT
TOTAL SKOR PENILAIAN KESEHATAN		84,05			
KATEGORI PENILAIAN KESEHATAN		SEHAT			
ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN					
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Cukup Baik dan perlu ditingkatkan dengan menambah sumber-sumber modal sendiri seperti memperbesar jumlah SIIU sehingga mampu meningkatkan SIIU yang belum					
Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan Berisiko Sangat Baik karena itu perlu dipertahankan dengan menjaga keseimbangan jumlah pembiayaan yang dibiayai dari internal koperasi dengan menjaga nilai					
Rasio Kecukupan Modal Sendiri Sangat Baik sehingga perlu dipertahankan jumlah keseimbangan modal tertimbang dengan ATMR dengan nilai rasio lebih besar dari 8 persen					
Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan sudah sangat baik sehingga perlu dipertahankan dengan tetap menjaga keseimbangan nilai rasio lebih besar dari 75%					
Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan rendah sehingga perlu dipertahankan prinsip ke-hati-hatian dalam menyalurkan pinjaman hingga rasio sebesar 0%					
Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan tinggi sehingga perlu dipertahankan prinsip ke-hati-hatian dalam menyalurkan pinjaman dengan batasan nilai rasio sebesar 90% sampai 100%					
Rasio Pinjaman berisiko terhadap Pinjaman diberikan rendah sehingga perlu dipertahankan prinsip ke-hati-hatian dalam menyalurkan pinjaman dengan tetap mempertahankan nilai rasio ini dalam kisaran kurang					
Manajemen Umum Koperasi sudah sangat baik pengurus dan pengelola untuk mempertahankan manajemen umum koperasi dengan melanjutkan rencana kerja jangka panjang, mempertahankan komitmen dan					
Manajemen Kelembagaan Koperasi cukup baik perlu pembenahan dari pengurus dan pengelola untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kelembagaan koperasi dengan standar operasional manajemen dan pro					
Manajemen Permodalan Koperasi sudah sangat baik pengurus dan pengelola untuk mempertahankan manajemen Permodalan koperasi dengan mempertahankan pertumbuhan modal sendiri, penyisihan cadangan					
Manajemen Aktiva Koperasi cukup baik pengurus dan pengelola untuk meningkatkan kapasitas manajemen Aktiva koperasi dengan memperbesar pinjaman dengan kolektibilitas lancar, dukungan agunan dan c					
Manajemen Likuiditas Koperasi sudah sangat baik pengurus dan pengelola untuk mempertahankan manajemen Likuiditas koperasi dengan menjaga sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantau					
Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto sangat baik sehingga perlu mempertahankan efisiensi dengan menurunkan biaya operasional pelayanan atau meningkatkan partisipasi bruto dengan kategori op					
Rasio beban usaha terhadap SHU cukup baik namun masih perlu melakukan perbaikan dengan menurunkan biaya usaha atau peningkatan SHU sampai mendekati kategori optimal 40 persen					
Rasio efisiensi pelayanan sangat baik sehingga perlu mempertahankan efisiensi dengan memperhatikan keseimbangan biaya karyawan dengan volume pinjaman yang diberikan sampai kategori optimal kurang d					
Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar cukup baik namun sebaiknya masih dilakukan pembenahan dengan memperhatikan porsi kas dan bank serta kewajiban lancar sampai pada kategori optimal 10 sa					
Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima baik perlu mempertahankan porsi pinjaman yang diberikan dan dana yang diterima pada kategori optimal sebesar 80 sampai 90 persen					
Rasio rentabilitas aset kurang baik ini menunjukkan bahwa porsi SIIU sebelum pajak masih begitu rendah dibandingkan dengan total aset perlu peningkatan nilai SIIU sebelum pajak sehingga rasio mencapai ka					
Rasio rentabilitas ekuitas sangat baik ini menunjukkan bahwa porsi SIIU bagian anggota dibandingkan dengan modal sendiri sangat mendukung perlu upaya mempertahankan SIIU bagian anggota pada kategori					
Rasio kemandirian operasional sangat baik ini menunjukkan bahwa porsi partisipasi netto dibandingkan dengan beban usaha dan beban perkoperasian sangat mendukung dan perlu dipertahankan					
Rasio partisipasi bruto sangat baik sehingga perlu mempertahankan nilai partisipasi bruto dan pendapatan pada kategori optimal 75 persen atau lebih					
Rasio promosi ekonomi anggota sangat baik sehingga perlu mempertahankan promosi ekonomi anggota pada kategori optimal sebesar 10 persen atau lebih					

3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

Untuk memperoleh Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM menggunakan formula

$$\text{Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM} = \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro}}{\text{Seluruh UMKM}} \times 100\%$$

Dari hasil pendataan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran tahun 2018 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Usaha Mikro : 10.371 unit

Jumlah UMKM : 10.882 Unit

Pada tahun 2019 ada penambahan Usaha Mikro yang diperoleh dari Izin Usaha Mikro Kecil yaitu sebanyak 537 Usaha Mikro, sehingga pada tahun 2019 terdapat 10.908 unit Usaha Mikro. Sedangkan Usaha kecil menjadi 492 unit, sehingga jumlah UMKM menjadi 11.360 unit. Sehingga untuk tahun 2019 di peroleh data sebagai berikut:

Jumlah Usaha Mikro : 10.908 unit

Jumlah UMKM : 11.360 unit

$$\text{Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM} = \frac{10.908}{11.360} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM} = 96,00\%$$

Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM mencapai 96,00% dari yang ditargetkan 96,00% atau capaian 100%.

Berikut hasil pedataan jumlah Usaha Mikro dan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran tahun 2018.

		CEGUR	PARIGI	PANGANDARAN	LANGKAPANGAR	KALIDUGANG	PADAHERANG	CULLANG	MANGUNJAYA	SIDAMULIH	CIMERAK	TOTAL	PERSentase
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	250	337	1382	1070	462	1223	456	413	313	578	6484	60%
	PEREMPUAN	134	484	1245	402	243	509	357	381	116	527	4398	40%
	TOTAL	384	821	2627	1472	705	1732	813	794	429	1105	10882	100%
KLASIFIKASI UMKM	USAHA MIKRO	358	785	2.575	1.361	643	1.674	740	789	383	1.063	10.37	95%
	USAHA KECIL	26	36	32	111	62	58	73	5	46	42	511	5%
	USAHA MENENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA	TOTAL	384	821	2627	1472	705	1732	813	794	429	1105	10882	100%
	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	10	3	53	20	2	19	10	1	9	3	130	1%
	PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA	INDUSTRI PENGOLAHAN	71	146	369	440	196	650	148	325	126	120	2591	24%
	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0%
	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0%
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA	KONSTRUKSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL, DAN SEPEDA MOTOR	217	485	1957	858	387	762	448	272	230	623	6239	57%
	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0%
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	82	180	215	140	115	273	192	186	52	339	1774	16%
	KOMUNIKASI	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0%
	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA	REAL ESTATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENJUALAN USAHA LAINNYA	1	2	4	3	4	12	5	1	4	3	39	0%
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	JASA PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0%
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA	KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0%
	KEGIATAN JASA LAINNYA	3	2	22	11	1	13	8	9	8	16	93	1%
	JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA; KEGIATAN YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA	KEGIATAN BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL	384	821	2627	1472	705	1732	813	794	429	1105	10882	100%
PENDIDIKAN	SD	230	357	1971	822	372	1011	348	481	204	580	6376	59%
	SMP	75	182	325	427	172	419	188	195	118	269	2370	22%
	SMA	62	221	284	169	136	200	211	97	89	196	1665	15%
PENDIDIKAN	D3	1	5	9	7	5	5	14	8	1	8	63	1%
	D4	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0%
	S1	7	18	23	26	10	21	29	6	5	29	174	2%
PENDIDIKAN	S2	2	0	0	0	1	0	3	0	0	1	7	0%
	LAINNYA	5	38	15	21	9	76	16	7	12	22	221	2%
	TOTAL	384	821	2627	1472	705	1732	813	794	429	1105	10882	100%
MARTIAL STATUS	BELUM KAWIN	4	5	16	14	10	17	9	4	37	18	134	1%
	KAWIN	350	742	2534	1396	666	1617	749	743	376	1007	10180	94%
	CERAI HIDUP	10	21	29	36	8	27	14	11	7	30	193	2%
MARTIAL STATUS	CERAI MATI	20	53	48	26	21	71	41	36	9	45	370	3%
	TOTAL	384	821	2627	1472	705	1732	813	794	429	1105	10882	100%

4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dapat di hitung menggunakan formula:

$$\text{Prosentase pertumbuhan sektor perdagangan} = \frac{\text{Nilai PDRD sektor Perdagangan tahun } n - \text{Nilai PDRD sektor Perdagangan tahun } n-1}{\text{Nilai PDRD sektor Perdagangan tahun } n-1} \times 100\%$$

Untuk capaian Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB yang ditargetkan 6,78% dengan realisasi 9,49% atau capaian 139,97%.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2019, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2019 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa indikator kinerja capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah:

1) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2019 ditargetkan A dan realisasinya A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM adalah:

- a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
- b. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
- c. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

A. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

- a. Masih adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun masih dalam rentang "sangat berhasil", yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Bappeda

B. Upaya perbaikan

- a. Pengukuran kinerja menggunakan aplikasi
- b. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran)

2) Persentase Koperasi Aktif

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Adanya kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap koperasi
- b. Meningkatnya kemampuan SDM Koperasi
- c. Sosialisasi pemahaman perkoperasian

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Ada dua cara untuk meningkatkan Persentase koperasi aktif yaitu dengan cara menambah koperasi yang aktif atau dengan cara membubarkan koperasi yang tidak aktif.

C. Upaya perbaikan

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada koperasi yang tidak aktif

3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Adanya pendataan usaha mikro kecil dan menengah

b. Peningkatan pemahaman untuk mengembangkan wirausaha baru

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Dengan adanya pencetakan wirausaha baru diharapkan pertumbuhan usaha mikro akan menjadi cepat.

C. Upaya perbaikan

Pembinaan UMKM dan mencetak wirausaha baru

4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

a. Mengadakan operasi pasar

b. Pemantauan kegiatan perdagangan

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dihitung oleh Badan Pusat Statistik

C. Upaya perbaikan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Indikator Kinerja Utama merupakan pedoman, untuk:

- 1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Tabel 2.2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase koperasi aktif		50%	32,69	33,65	34,48	36,95	32,69%	33,96%	35,23%	36,50%	
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil											
3	Ekspor Bersih Perdagangan**		700	100	125	130	135	4.574	4.750	5.000	5.250	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah disampaikan dalam kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran di dalam menjalankan urusan pemerintahan telah mengacu pada aturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas selama ini secara umum Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memanfaatkan SDM, sarana dan prasarana yang ada, tetapi bukan berarti dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan suatu kendala atau hambatan, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Permasalahan di Bidang Koperasi
 - Kesadaran anggota dalam berkoperasi masih perlu ditingkatkan
 - Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih perlu ditingkatkan
 - Jiwa Kewirausahaan para pengelola usaha kecil dan menengah relatif masih kurang
 - Kurangnya media pemasaran produk UMKM
2. Permasalahan di Bidang Perdagangan
 - Dampak Globalisasi membawa dampak dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan persaingan di sektor perdagangan dalam negeri
 - Pengawasan dan pemantauan yang lebih baik terhadap barang-barang yang beredar di pasaran masih perlu ditingkatkan agar masyarakat/konsumen mendapat perlindungan
3. Permasalahan di Bidang Pasar
 - Masih banyaknya pasar Desa yang belum di revitalisasi
 - Pengelolaan pendapatan dari retribusi kios belum optimal

Kendala seperti terungkap diatas diupayakan dengan mengoptimalkan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki agar tercapai tujuan, sasaran dan Program yang telah disepakati bersama. Untuk lebih meningkatkan program-program pembangunan khususnya di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan perlu adanya peningkatan sarana, prasarana dan Sumber Daya manusia yang memadai sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang signifikan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal,

eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021 seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2016 - 2021.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2021, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rancangan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3 T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2020
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
PERANGKAT DAERAH/ BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Dinas Perdagangan Dan Koperasi Ukm				9.170.716.150,00											6.366.589.943,00
Umum				3.168.116.150,00											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.660.912.356,00											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 : Jumlah surat yang dikabla	4196 Surat	6.683.617,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	3000 Buah	3.410.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 : Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Rekening	85.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	2 Rekening dan 12 Bulan	55.200.225,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 : Jumlah Kendaraan yang berizin	7 Unit	7.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	9 Unit	81.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 : Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	3 Orang	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	101.612.000,00
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1 : Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	3 Orang	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	0,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 : Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	110 Jenis	300.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	85 Jenis	59.965.317
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 : Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	4004 Jumlah	300.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7 Jenis	43.522.358
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 : Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	7 Unit	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis	1.292.700
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 : Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	7 Unit	40.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Jenis	15.000.552
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1 : Jenis dan jumlah bahan	10 Jumlah Medie	38.652.239,00	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase sarana prasarana	100%	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Jenis	11.280.000,00



Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
PERANGKAT DAERAH/ BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Penundang-Undangan	bacaan yang dibeli tiap bulan			BIDANG PERDAGANGAN	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	kantor yang terpenuhi		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang baik					
	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4 Jenis	161.051.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	0,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 : Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	150 Kali	350.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	140 Kegiatan dan 140 Laporan	132.463.000,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 : Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	150 Kali	80.525.500,00											
	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi	1 : Jumlah SDM Pengemudi	1 orang	36.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	0,00
	Penyediaan Jasa Publikasi	1 : Jumlah Penyediaan Jasa Publikasi	1 Kali	36.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	1 Sistem	19.800.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	950.444.525,00											
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 : Jumlah kendaraan operasional	1 Unit	30.000.000,00											
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 unit	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Jenis dan 15 Unit/Buah	64.550.008,00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 : Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	12 Unit	240.932.296,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Jenis dan 15 Unit/Buah	0,00
	Pengadaan Mebel	1 : Jumlah mebel yang diadakan	1 Paket	22.547.140,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 Jenis dan 7 Unit/Buah	22.727.586,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 : Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jumlah Gedung Kantor	53.533.352,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 Unit dan ... M2	5.186.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 : Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	121.158.667,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	41.183.204,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	8 Unit	185.273.070,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	9 Unit	0,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 : Jumlah peralatan gedung kantor yang	7 Unit	27.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase sarana prasarana	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	35 Unit	6.000.000,00



Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
PERANGKAT DAERAH/ BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		dipelihara rutin/berkala				DAERAH KABUPATEN/KOTA	kantor yang terpuh		Usuran Pemerintah Daerah						
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Website SKPD	1 : Jumlah Website SKPD yang dipelihara rutin/berkala	1 Web	50.000.000,00											
	Penyewaan Tanah/Gedung Kantor	1 : Jumlah Tanah/Gedung Kantor yang di sewa	2 Jumlah Gedung Kantor	150.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan urusan pemerintahan daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 : Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	180.000.000,00											
	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Penengkapannya	1 : Jumlah pakain dinas beserta penengkapannya yang diadakan	90 Orang	90.000.000,00											
	Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	1 : Jumlah pakain khusus hari-hari tertentu yang diadakan	90 Orang	90.000.000,00											
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 : Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	111.202.550,00											
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 : Jumlah Pegawai yang mengikuti	5 Orang	62.966.300,00											
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 : Jumlah Pegawai yang mengikuti	45 Orang	18.246.250,00											
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 : Jumlah Pegawai yang mengikuti	50 Orang	30.000.000,00											
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 : Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	275.556.719,00											
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	7.005.719,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	3 Laporan	6.033.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1 : Jumlah laporan keuangan semesteran	2 dokumen	7.005.700,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	2 Laporan	1.039.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 : Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	7.005.700,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	12 Kegiatan dan 1 Laporan	40.682.750
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	1 : Jumlah dokumen perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	6 Dokumen	84.680.600,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	31.333.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 : Jumlah Sistem	1 Jumlah Sistem	42.920.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	27.000.000,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi	1 : Jumlah Sistem	1 Jumlah Sistem	42.920.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat	100%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	7 Jenis dan 399 Unit/Buah	27.000.000,00



Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
PERANGKAT DAERAH/ BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Pengelolaan Barang Daerah					DAERAH KABUPATEN/KOTA	dengan kualitas baik		Perangkat Daerah	daerah dalam kondisi baik					
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 : Jumlah Sistem	1 Jumlah Sistem	37.009.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100%	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan	12 Laporan	24.600.000,00
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100%	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi yang ditetapkan	2.358 Objek	118.800.000,00
	Penyusunan LAKP	1 : Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00											
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 : Jumlah Sistem	1 Jumlah Sistem	37.009.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12 Kegiatan dan 12 Laporan	22.920.000,00
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	1 Sistem	0,00
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	17 Orang	2.313.855.922
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				716.000.000,00											
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	1 : Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98%	320.000.000,00											
	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	1 : Jumlah Peserta	20 Orang	30.000.000,00											
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 : Jumlah Monitoring	20 Kali	20.000.000,00											
	Validasi dan Pemutakhiran Data UMKM	1 : Jumlah Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1%	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	100 Pelaku Usaha	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	45000 Pelaku Usaha Mikro	0,00
	Bintek Usaha Kecil Menengah	1 : Jumlah Peserta	70 Orang	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1%	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	100 Pelaku Usaha	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	45000 Pelaku Usaha Mikro	1.132.169.530
	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1 : Jumlah Sarana pemasaran yang dikembangkan	30 Sarana	100.000.000,00											
	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Koperasi Pondok Pesantren	1 : Jumlah Peserta	70 Orang	70.000.000,00											
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1 : Persentase Koperasi Aktif	36,95 %	396.000.000,00											
	Sosialisasi Prinsip-Prinsip	1 : Jumlah Peserta	40 Jumlah Peserta	56.000.000,00											



RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
PERANGKAT DAERAH/ BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Pemahaman Perkoperasian														
	Peningkatan SDM Pengelola Koperasi Dan Anggotanya	1 : Jumlah Peserta	50 Jumlah Peserta	120.000.000,00											
	Pembinaan, Pengawasan, dan Peningkatan Koperasi Berprestasi	1 : Jumlah Koperasi	70 Jumlah Koperasi	70.000.000,00		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh	48,61%	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan penundang-undangan	35 Koperasi	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	72 Koperasi Aktif	175.367.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan	1 : Jumlah Koperasi	1 Koperasi	10.000.000,00											
	Pembudayaan dan peningkatan peran Dekopinda Kabupaten Pangandaran	1 : Jumlah peserta	70 Orang	140.000.000,00											
Perdagangan				5.286.600.000,00											
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1 : Persentase peningkatan pelaku usaha yang terlibat niaga	55%	991.300.000,00											
	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1 : Jumlah koordinasi	25 Kali	70.000.000,00											
	Peningkatan Pengawasan Penedaran Barang dan Jasa	1 : Jumlah Barang dan Jasa yang diawasi peredarannya	20 Jenis	136.000.000,00		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	71%	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	21 Barang Pokok	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	5 Kegiatan	132.491.791,00
	Operasi Pasar Murah (OPM)	1 : Jumlah paket yang disediakan	15000 Paket	60.000.000,00		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	55%	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	3 Kali	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	1 Kegiatan	25.000.000,00
	Pendataan Dan Pemantauan Barang Berasubidi (LPG, BBM Dan Pupuk)	1 : Jumlah Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00											
	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kametrolgan	1 : Jumlah peserta yang mengikuti	0 Peserta	255.300.000,00											
	Pendampingan Tera/Ulang serta pengawasan BDKT	1 : Jumlah alat yang ditera	6000 Alat	200.000.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan terlibat ukur	51,28%	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTPP yang ditera, tera ulang, dan diawasi	2000 Unit	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	40 Kegiatan	79.745.000,00
	Pendataan Dan Monitoring Toko Swalayan	1 : Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00											
	Peningkatan Pemahaman Tentang Cukai Legal	1 : Jumlah peserta yang mengikuti	500 Orang	150.000.000,00											
	Facilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan	1 : Jumlah permasalahan yang diselesaikan	25 Kali	70.000.000,00											



RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
PERANGKAT DAERAH/ BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	pengaduan konsumen														
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1 : Persentase Peningkatan Ekspor	19%	205.300.000,00											
	Promosi Produk-Produk Unggulan	1 : Jumlah Produk yang dipromosikan	7 Produk	80.000.000,00											
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 : Jumlah peserta	350 Orang	75.300.000,00											
	Sosialisasi Standar Mutu Produk (SNP)	1 : Jumlah Peserta	0 Peserta	50.000.000,00											
	Program Pembinaan Pedagang Asongan yang dibina	1 : Jumlah PKL dan Pedagang Asongan yang dibina	2700 Pedagang	90.000.000,00											
	Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kakilima dan Asongan	1 : Jumlah Pedagang yang diawasi	20 Pedagang	90.000.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	17,86%	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	75 Orang	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina dan dikendalikan	2500 Pedagang	24.360.000,00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar	1 : Persentase Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	26,92 %	4.000.000.000,00											
	Revitalisasi Pasar	1 : Jumlah Pasar	3 Unit	3.500.000.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	17,86%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	2 Unit	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan yang dibuat	6 Dokumen	1.400.000.000,00
	Penyusunan Amdal Pasar	1 : Jumlah Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			0,00
	Penyusunan DED Pasar	1 : Jumlah Dokumen	2 dokumen	200.000.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			0,00
	Penyusunan UKL UPL Pasar	1 : Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.000.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			0,00
	Penyusunan Andal Lalin	1 : Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.000.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			0,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke Perangkat Daerah sesuai tupoksi.

Dari situ kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dalam draft Renja PD pada tahun yang akan datang. Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program atau kegiatan usulan dari masyarakat, mulai dari ketersediaan anggaran, sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pelatihan dan bantuan peralatan, bukan kewenangan/ tidak diakomodir/ penyesuaian indikator dan target/ penyesuaian pendanaan. Untuk lebih jelasnya ada di tabel 2.4

Tabel 2.4 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Pangandaran

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pelatihan Kerajinan Masyarakat	Desa Batumalang	Jumlah peserta Pelatihan Kerajinan Masyarakat	70 Orang	Disatukan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Ranwal (sebagai Peserta)
2.	Revitalisasi Pasar desa Sindangsari	Desa Sindangsari	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	1 Unit	Renja PD
3.	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pasar	Desa Jayasari dan Bangunjaya	Jumlah Paket peningkatan pengembangan pasar	2 Paket	penyesuaian indikator dan target
4.	Pengadaan Sarana Prasarana dan Penguatan Modal Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	5 Desa Kecamatan Mangunjaya	Jumlah sarana prasarana yang diadakan	20 Unit	penyesuaian indikator dan target
5.	Pelatihan Kerajinan Handycraft Kelompok Ibu-Ibu PKK	Desa Cibogo	Jumlah kelompok Pelatihan Kerajinan	1 Kelompok	Disatukan dengan kegiatan Pengembangan



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Handycraft Kelompok Ibu-Ibu PKK		Usaha Kecil Menengah di Ranwal (sebagai Peserta)
6.	Pengembangan peningkatan wirausaha, UMKM, BUMDesa dalam menggali Potensi Desa (Pelatihan/keterampilan)	Wilayah Desa Karangmulya	Jumlah peserta	100 Orang	Disatukan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Ranwal (sebagai Peserta)
7.	Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama	Desa Karangpawitan	Jumlah kelompok penerima bantuan modal	2 kelompok	penyesuaian indikator dan target
8.	Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Karangpawitan		2 kelompok	bukan kewenangan
9.	Peningkatan Kapasitas Keterampilan dalam Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin	Desa Karangpawitan		1 kegiatan	bukan kewenangan
10.	Pelatihan Home Industri	Desa Karangpawitan	Jumlah peserta pelatihan home industri	50 Orang	Disatukan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Ranwal (sebagai Peserta)
11.	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan - PELATIHAN KELOMPOK PENGRAJIN	DESA CIGANJENG	Jumlah peserta pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan	50 orang	Disatukan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Ranwal (sebagai Peserta)
12.	Bantuan Modal dan Pelatihan manajemen pengelolaan BUMDES	Desa Se Kec. Parigi		1 paket	bukan kewenangan
13.	pelatihan dan bantuan alat home industri pengolahan alat produk unggulan desa	Desa Se Kec. Parigi	Jumlah peserta	50 Orang	Disatukan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Ranwal (sebagai Peserta)
14.	Pelatihan Perempuan Di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif	Desa Se Kec. Parigi	Jumlah peserta pelatihan Perempuan Di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif	50 Orang	Renja PD
15.	Bantuan Modal dan Pelatihan manajemen pengelolaan BUMDES	Desa Bojong		1 paket	bukan kewenangan
16.	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kerajinan	Desa Bojong		2 kelompok	bukan kewenangan
17.	pelatihan dan bantuan alat home industri	Desa Karangbenda	Jumlah peserta pelatihan	100 Orang	Disatukan dengan



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	pengolahan alat produk unggulan desa				kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Ranwal (sebagai Peserta)
18.	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	Desa Ciliang		1	bukan kewenangan
19.	Percontohan Lahan Produktif, Demplot, Pupuk dan Benih	Desa Karangbenda kelompok tani sari asih 1-II-III-IV-V, Bahagia, agri sehati, harapanmukti, harapanmulya, motekar, dan KUBE		1 Paket	bukan kewenangan
20.	pelatihan dan bantuan alat home industri pengolahan alat produk unggulan desa	Desa Karangbenda Kelompok pengrajin sale, opak, rangginang, ayaman dari lidi kelapa, KUBE dan kelompok tani DII.		1 Paket	Renja PD
21.	Penambahan Modal BUMDes	Desa Karangbenda . BUMDes Tunas Harapan Sejahtera		1 Paket	bukan kewenangan
22.	Sarana Pelatihan Home Industri	Desa Karangbenda	Jumlah sarana prasarana yang diadakan	1 Paket	Disatukan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Ranwal (sebagai Peserta)
23.	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kerajinan dan Produk Unggulan	Desa Parigi	Jumlah peserta	40 pelaku usaha	Disatukan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Ranwal (sebagai Peserta)
24.	Pelatihan Perempuan Di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif	Desa karangjaladri	Jumlah peserta pelatihan Perempuan Di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif	100 Orang	Renja PD
25.	Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat	Desa Bojong	Jumlah peserta Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat	100 Orang	Renja PD
26.	Pembangunan Pasar Desa Cibenda	Desa Cibenda Dusun Sinargalih	Jumlah Pasar yang dibangun	1 Unit	Renja PD



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
27.	Percontohan Budidaya Perikanan	Desa Bojong		1 paket	bukan kewenangan
28.	Pengembangan Peningkatan Wirausaha, UMKM, Bumdesa Dalam Menggali Potensi Desa (Pelatihan/Keterampilan)	Wilayah Desa Karanggmulya	Jumlah Peserta	50 Orang	Disatukan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Ranwal (sebagai Peserta)

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional

A. Kebijakan Kementerian

a. Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

- 1) Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
- 2) Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
- 3) Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
- 4) Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 5) Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
- 6) Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
- 7) Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

b. Kebijakan Kementerian Perdagangan

- 1) Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
- 2) Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional
- 3) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
- 4) Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional
- 5) Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- 6) Meningkatkan perlindungan konsumen
- 7) Meningkatkan efisiensi sistem distribusi & logistik
- 8) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan

3.1.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat**A. Kebijakan Dinas Provinsi****a. Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil**

1. Peningkatan Pemahaman Anggota Melalui Diklat Perkoperasian
2. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dalam memanfaatkan ICT dan Jaringan Pemasaran
3. Peningkatan Koperasi Aktif
4. Peningkatan kepatuhan Koperasi untuk Menerapkan Nilai dan Prinsip Koperasi
5. Peningkatan Kemandirian Koperasi
6. Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Koperasi untuk Menjangkau Pasar Terutama dalam Promosi Produk, Akses Informasi Pasar dan Saluran Pemasaran
7. Pengembangan Kapasitas Koperasi untuk Berinovasi dalam Pengembangan dan Layanan bagi Anggota
8. Peningkatan Akses Pemasaran Berbasis ICT
9. Peningkatan Kualitas Produk UMKM
10. Peningkatan Jejaring Usaha UMKM
11. Peningkatan Iklim Usaha di Pesantren

b. Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
2. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran**A. Visi Kabupaten Pangandaran****"KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA"**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Pangandaran : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Tujuan Wisata : Simpul-simpul kegiatan pariwisata exiting maupun simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan ditata secara terpadu dengan menonjolkan ke-khasan potensi masing-masing

Kelas Dunia : Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi untuk infrastruktur, fasilitas dan lingkungan alami serta pelaku wisata dan masyarakat.

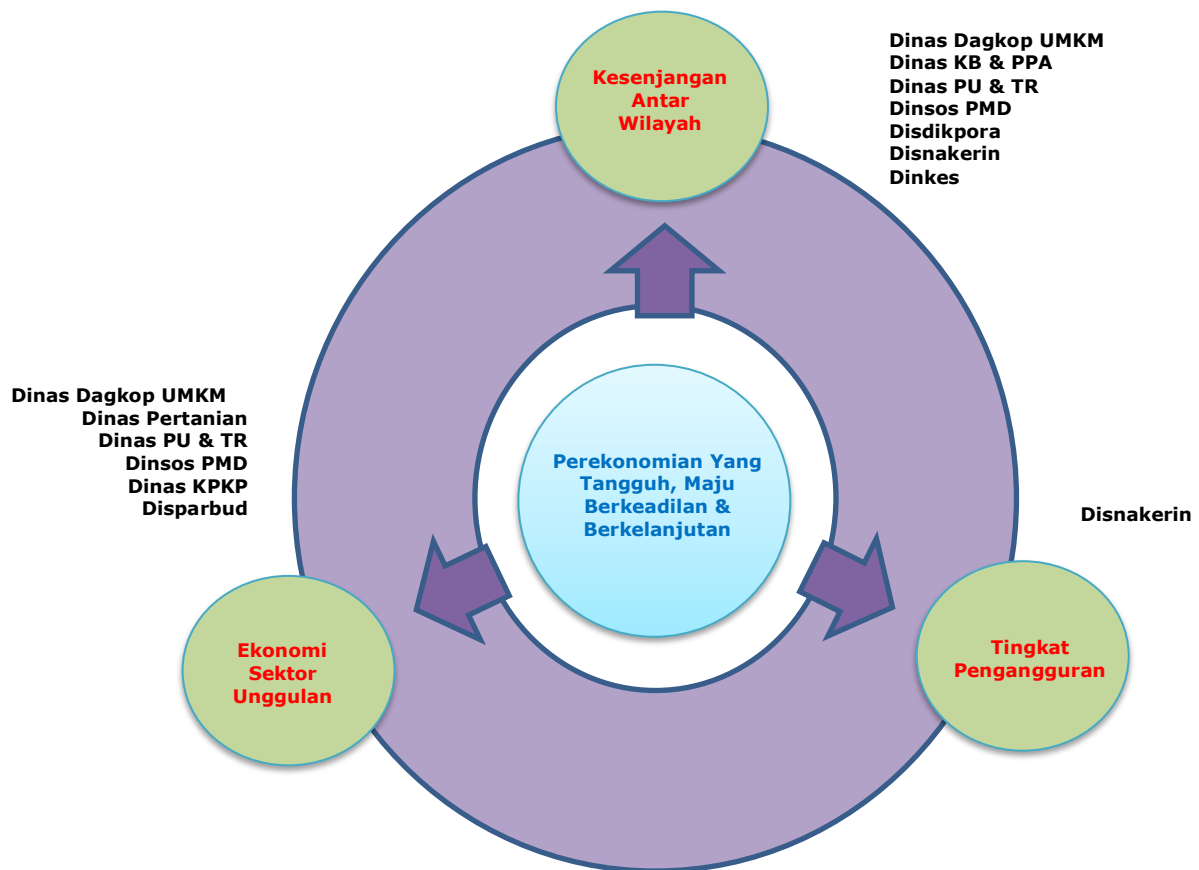
B. Misi Kabupaten Pangandaran

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas
4. Memperkuat katahanan nilai-nilai kearifan lokal
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dn berdaya saing

6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi Keenam : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-6 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-6 sebagai berikut :



Gambar 3.1
Perencanaan Terintegrasi Misi 6

C. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021:

1. Reformasi birokrasi

2. Kualitas lingkungan hidup
3. Kualitas infrastruktur dasar, pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan pariwisata
4. Penurunan resiko bencana
5. Penguatan kearifan lokal
6. Kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan pemerintahan,
7. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta pemberdayaan dan kesetaraan gender
8. Daya saing sumberdaya manusia (SDM)
9. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) merupakan suatu proses yang berorientasi, pada hasil yang ingin dicapai selama kuruh waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program serta, ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi, pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

3.2.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapun tujuan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) 2016 - 2021 yaitu:

- 1) Mewujudkan Reformasi Birokrasi
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi yang berkualitas
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro yang berkualitas
- 4) Terwujudan perdagangan yang berdaya saing

3.2.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik, terukur.

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM
- 2) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi
- 3) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro
- 4) Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
- 2) Prosentase Koperasi Aktif
- 3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

3.2.1.3 Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Strategi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kinerja Aparatur
- 2) Penguatan tertib niaga
- 3) Penguatan sinergitas antar stakeholder untuk menghadapi persaingan usaha pada ekonomi global
- 4) Pembinaan Pegawai Kakilima dan Asongan
- 5) Memperkuat pasar lokal dan mengembangkan pasar regional, nasional maupun internasional
- 6) Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan Usaha Mikro
- 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produk serta fasilitasi pemasaran secara online dan offline
- 8) Penyertaan modal bagi koperasi yang kurang sehat
- 9) Pembinaan koperasi yang berkesinambungan

3.2.1.4 Arah Kebijakan

Sedangkan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur
- 2) Pembangunan iklim dunia usaha yang kondusif dan budaya tertib niaga untuk pengembangan dunia usaha
- 3) Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam rangka perluasan jejaring pemasaran antar daerah dan pengembangan ekspor
- 4) Pembinaan Pegawai Kakilima dan Asongan

- 5) Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat serta pembatasan pasar modern
- 6) Pelatihan manajemen, kualitas produk dan teknologi pemasaran
- 7) Peningkatan dan pengembangan usaha mikro
- 8) Pembinaan lingkungan sosial lingkup usaha mikro
- 9) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 10) Pembubaran koperasi pasif

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut.



Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kab. Pangandarang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM				6.366.589.943				7.003.248.937
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				5.059.053.413				5.564.958.754
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100%	3.397.456.622			100%	3.737.202.284
						2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		100%				100%	
						3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100%				100%	
						4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100%				100%	
X	XX	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu		100%	37.366.000			100%	41.102.600
						2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu		100%				100%	
						3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100%				100%	
X	XX	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Disdagkop UMKM	2 Dokumen	31.333.000	APBD Kab.		2 Dokumen	34.466.300
X	XX	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	Disdagkop UMKM	3 Laporan	6.033.000	APBD Kab.		3 Laporan	6.636.300
X	XX	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik		100%	2.382.577.672			100%	2.620.835.439
X	XX	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Disdagkop UMKM	19 Orang	2.313.855.922	APBD Kab.		19 Orang	2.545.241.514
X	XX	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disdagkop UMKM	12 Dokumen	27.000.000	APBD Kab.		12 Dokumen	29.700.000
X	XX	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Disdagkop UMKM	12 Kegiatan dan 1 Laporan	40.682.750	APBD Kab.		12 Kegiatan dan 1 Laporan	44.751.025



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X	XX	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	Disdagkop UMKM	2 Laporan	1.039.000	APBD Kab.		2 Laporan	1.142.900
X	XX	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik		100%	27.000.000			100%	29.700.000
X	XX	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Disdagkop UMKM	7 Jenis dan 399 Unit/Buah	27.000.000	APBD Kab.		7 Jenis dan 399 Unit/Buah	29.700.000
X	XX	1	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah		100%	143.400.000			100%	157.740.000
X	XX	1	2,04	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi yang ditetapkan	Disdagkop UMKM	2 Objek	118.800.000	APBD Kab.		2 Objek	130.680.000
X	XX	1	2,04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan	Disdagkop UMKM	12 Laporan	24.600.000	APBD Kab.		12 Laporan	27.060.000
X	XX	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		100%	22.920.000			100%	25.212.000
X	XX	1	2,05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Disdagkop UMKM	12 Kegiatan dan 12 Laporan	22.920.000	APBD Kab.		12 Kegiatan dan 12 Laporan	25.212.000
X	XX	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	283.323.927			100%	311.656.320
X	XX	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Disdagkop UMKM	7 Jenis	1.292.700	APBD Kab.		7 Jenis	1.421.970
X	XX	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Disdagkop UMKM	110 Jenis	59.965.317	APBD Kab.		110 Jenis	65.961.849
X	XX	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Disdagkop UMKM	20 Jenis	15.000.552	APBD Kab.		20 Jenis	16.500.607
X	XX	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Disdagkop UMKM	6 Jenis	43.522.358	APBD Kab.		6 Jenis	47.874.594
X	XX	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Disdagkop UMKM	10 Jenis	11.280.000	APBD Kab.		10 Jenis	12.408.000
X	XX	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Disdagkop UMKM	140 Kegiatan dan 140 Laporan	132.463.000	APBD Kab.		140 Kegiatan dan 140 Laporan	145.709.300
X	XX	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	Disdagkop UMKM	1Sistem	19.800.000	APBD Kab.		1Sistem	21.780.000
X	XX	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		100%	207.277.594			100%	228.005.353



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X	XX	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Disdagkop UMKM	3 Jenis dan 7 Unit/Buah	22.727.586	APBD Kab.		3 Jenis dan 7 Unit/Buah	25.000.345
X	XX	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Disdagkop UMKM	5 Jenis dan 15 Unit/Buah	64.550.008	APBD Kab.		5 Jenis dan 15 Unit/Buah	71.005.009
X	XX	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Disdagkop UMKM	2 Unit dan ... M2	120.000.000	APBD Kab.		2 Unit dan ... M2	132.000.000
X	XX	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		100%	160.222.225			100%	176.244.448
X	XX	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Disdagkop UMKM	3200 Buah	3.410.000	APBD Kab.		3200 Buah	3.751.000
X	XX	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Disdagkop UMKM	2 Rekening dan 12 Bulan	55.200.225	APBD Kab.		2 Rekening dan 12 Bulan	60.720.248
X	XX	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Disdagkop UMKM	12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	101.612.000	APBD Kab.		12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	111.773.200
X	XX	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		100%	133.369.204			100%	146.706.124
X	XX	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Disdagkop UMKM	1 Unit	41.183.204	APBD Kab.		1 Unit	45.301.524
X	XX	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Disdagkop UMKM	8 Unit	81.000.000	APBD Kab.		8 Unit	89.100.000
X	XX	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Disdagkop UMKM	35 Unit	6.000.000	APBD Kab.		35 Unit	6.600.000
X	XX	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Disdagkop UMKM	2 Unit dan ... M2	5.186.000	APBD Kab.		2 Unit dan ... M2	5.704.600
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi		25,00%	1.424.360.000			25,00%	1.566.796.000
3	30	3	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi		2 Unit	1.400.000.000			2 Unit	1.540.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan yang dibuat		1 Dokumen	1.400.000.000	APBD Kab.		1 Dokumen	
3	30	3	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya		75 Orang	24.360.000			75 Orang	26.796.000
3	30	3	2,02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina dan dikendalikan	Kab. Pangandaran	75 Orang	24.360.000	APBD Kab.		75 Orang	26.796.000
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil		71,43%	157.491.791			71,43%	173.240.970
3	30	4	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya		21 Barang Pokok	157.491.791			21 Barang Pokok	173.240.970
3	30	4	2,02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	Kab. Pangandaran	5 Kegiatan	132.491.791	APBD Kab.		5 Kegiatan	145.740.970
3	30	4	2,02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	25.000.000	APBD Kab.		1 Kegiatan	27.500.000
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang tertib ukur		51,28%	79.745.000			51,28%	87.719.500
3	30	6	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang, dan diawasi		2000 Unit	79.745.000			2000 Unit	87.719.500
3	30	6	2,01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Kab. Pangandaran	40 Kegiatan	79.745.000	APBD Kab.		40 Kegiatan	87.719.500
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.307.536.530			0	1.438.290.183
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh		48,61%	175.367.000			48,61%	192.903.700
2	17	3	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan		35 Koperasi	175.367.000			35 Koperasi	192.903.700
2	17	3	2,01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	Kab. Pangandaran	72 Koperasi Aktif	175.367.000	APBD Kab.		72 Koperasi Aktif	192.903.700
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas		0,05%	1.132.169.530			0,05%	1.245.386.483
2	17	8	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas		5 Pelaku	1.132.169.530			5 Pelaku	1.245.386.483



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	17	8	2,01	1	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pangandaran	45.000 Pelaku	1.132.169.530	APBD Kab.		45.000 Pelaku	1.245.386.483

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**1. Administrasi Umum****a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Masukan : Jumlah Dana Rp 6.010.000

Keluaran : Jumlah surat yang dikelola 3000 surat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan : Jumlah Dana Rp 75.746.315

Keluaran : Jenis dan Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan 2 rekening

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Masukan : Jumlah Dana Rp 32.700.000

Keluaran : Jumlah kendaraan yang berijin 9 unit

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 52.200.000

Keluaran : Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan 3 orang

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 107.912.500

Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 2 Gedung Kantor

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 304.350.251

Keluaran : Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 110 jenis

g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Masukan : Jumlah Dana Rp 305.952.575

Keluaran : Jenis dan Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan 7 jenis

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 28.299.601

Keluaran : Jumlah dan Komponen Listrik yang dibeli 7 jenis

i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Masukan : Jumlah Dana Rp 44.781.133

Keluaran : Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli 7 Jenis

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Masukan : Jumlah Dana Rp 18.000.000

Keluaran : Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan 10 media

- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 160.690.000
 - Keluaran : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 4 jenis
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 432.045.000
 - Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti 160 kali
- m. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 69.365.000
 - Keluaran : Jumlah Kendaraan Operasional 2 unit
- n. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 134.870.806
 - Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor 10 unit
- o. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 252.518.190
 - Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor 7 unit
- p. Pengadaan Mebeleur
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 261.608.618
 - Keluaran : Jumlah mebeleur 1 paket
- q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 68.581.312
 - Keluaran : Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara rutin/berkala 1 mobil
- r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenaraan Dinas/Operasional
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 115.201.680
 - Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala 8 kendaraan
- s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 27.000.000
 - Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 2 gedung kantor
- t. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 250.000.000
 - Keluaran : Jumlah Gedung Kantor yang disediakan 2 gedung
- u. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Masukan : Jumlah Dana Rp 42.916.000
 - Keluaran : Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 1 orang

2. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Masukan : Jumlah Dana Rp 19.060.650
Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 50 set
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Masukan : Jumlah Dana Rp 37.485.000
Keluaran : Jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu 100 set
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Masukan : Jumlah Dana Rp 90.000.000
Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti 10 orang
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 22.350.000
Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti 45 orang
 - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 26.709.400
Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti 50 orang
3. Administrasi Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Masukan : Jumlah Dana Rp 191.004.000
Keluaran : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 laporan
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
Masukan : Jumlah Dana Rp 7.000.000
Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran 2 laporan
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Masukan : Jumlah Dana Rp 7.000.000
Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 laporan
 - d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Masukan : Jumlah Dana Rp 2.365.884.572
Keluaran : Jumlah ASN 17 ASN
4. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Masukan : Jumlah Dana Rp 39.033.000

- Keluaran : Jumlah dokumen 1 dokumen
- b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan
- Masukan : Jumlah Dana Rp 83.222.000
- Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku
 - a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Masukan : Jumlah Dana Rp 375.449.500

Keluaran : Jumlah Pelaku UMKM 250 Pelaku UMKM
 - b. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Masukan : Jumlah Dana Rp 607.472.000

Keluaran : Jumlah dokumen 1 dokumen

III. PROGRAM PENGEMBANGAN (UMKM)

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

Masukan : Jumlah Dana Rp 5.089.750.906

Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi 250 Pelaku Usaha Mikro

IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan dan Pemahaman Pengentahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Masukan : Jumlah Dana Rp 274.149.000

Keluaran : Jumlah Koperasi 30 Koperasi

V. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 71.966.000
Keluaran : Jumlah Koperasi Aktif 72 Koperasi Aktif
 - b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 10.178.000
Keluaran : Jumlah Koperasi yang diperiksa 72 Koperasi Aktif

VI. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 15.148.000
Keluaran : Jumlah Koperasi 35 Koperasi Aktif

VII. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi
Masukan : Jumlah Dana Rp 137.399.500
Keluaran : Jumlah Koperasi 30 Koperasi

VIII. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

- Masukan : Jumlah Dana Rp 174.219.908
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengawasan 4 kegiatan
- b. Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 49.109.300
Keluaran : Jumlah Paket yang disediakan 5000 paket
2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Masukan : Jumlah Dana Rp 13.584.900
Keluaran : Jumlah Dokumen 3 dokumen
3. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Masukan : Jumlah Dana Rp 13.584.900
Keluaran : Jumlah Dokumen 2 dokumen

IX. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- a. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
Masukan : Jumlah Dana Rp 17.235.000
Keluaran : Jumlah UTTP yang diawasi 1500 unit
- b. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Masukan : Jumlah Dana Rp 358.689.000
Keluaran : Jumlah alat yang ditera 1500 unit

X. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 100.038.000
Keluaran : Jumlah produk yang dipromosikan 7 produk
- b. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota

Masukan : Jumlah Dana Rp 151.146.900
Keluaran : Jumlah peserta 450 orang

XI. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

1. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 400.647.000
Keluaran : Jumlah peserta 1000 orang

XII. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 89.787.000
Keluaran : Jumlah Pedagang yang dibina 2500 pedagang
2. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 1.234.700.000
Keluaran : Jumlah dokumen 5 dokumen
3. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 75.074.000
Keluaran : Jumlah dokumen 1 dokumen

BAB 5

PENUTUP

Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, akan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahun yang bersangkutan, disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2016-2021 serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dan telah disesuaikan dengan pemetaan Permendagri Nomer 90 tahun 2019. Bahwa untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Strategik Tahun 2016 – 2021 maka ditetapkan Program dan Kegiatan tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
2. Bahwa Program dan Kegiatan yang rencana dilaksanakan pada tahun 2021 dititikberatkan pada peningkatan efektifitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pada bidang Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dalam visi dan misi Perangkat Daerah.



Parigi, 17 November 2020

KERALA DINAS PERDAGANGAN DAN
KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. TEDI GARNIDA, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680728 199303 1 008



KERTAS KERJA PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI I										PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI II (PEMUTAKHIRAN)											
RENSTRA PD INPUT SIMRAL					RKPD INPUT SIPD										PPAS/RAPBD INPUT SIPD											
PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Dinas Perdagangan dan Koperasi																										
UMKM				9.179.716.150,00																						
				3.169.116.150,00																						
Dinas Perdagangan dan Koperasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.650.912.350,00																						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat yang dikelola	4196 Surat	6.853.617,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	3000 Surat	6.010.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	3000 Buah	3.410.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Rekening	65.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis dan Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2 Rekening	75.746.315,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Rekening dan 12 Bulan	55.200.225,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Jumlah kendaraan yang berizin	7 Unit	7.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang berizin	6 Unit	0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang disediakan	9 Unit	81.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	3 Orang	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	3 Orang	52.200.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	101.612.000,00
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1. Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	3 Orang	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki rutin/berkala	2 gedung kantor	107.912.800,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	0
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	110 Jenis	300.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	110 Jenis	304.350.251,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	85 Jenis	59.955,317
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	4004 Jumlah	300.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang Dibuat dan Digandakan	7 Jenis	305.962.575,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7 Jenis	43.522,398
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	7 Unit	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Komponen Listrik yang dibeli	7 Jenis	28.298.601,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis	1.292,700
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	7 Unit	40.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Dibeli	7 Jenis	44.781.133,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Jenis	15.000,952
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	10 Jumlah Media	38.652.239,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	10 media	18.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Jenis	11.280.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4 Jenis	161.851.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4 jenis	160.690.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	0
	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1. Jumlah Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	150 Kali	350.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	160 kali	432.045.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD yang dilaksanakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD yang dilaksanakan	140 Kegiatan dan 140 Laporan	132.463.000,00
	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1. Jumlah Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	150 Kali	80.528.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	160 kali	432.045.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD yang dilaksanakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD yang dilaksanakan	140 Kegiatan dan 140 Laporan	132.463.000,00
	Penyediaan Jasa Tenaga Pengumpul	1. Jumlah SDM Pengumpul	1 orang	36.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang berizin	1 unit	32.710.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 5 Orang atau 3 Layanan	0
	Penyediaan Jasa Publikasi	1. Jumlah Penyediaan Jasa Publikasi	1 kali	36.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SIPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SIPD	3 laporan	0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD yang dilaksanakan	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	1 Sistem	19.800.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	650.444.525,00																					



Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI I										PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI II (PEMUTAKHIRAN)											
RENSTRA PD INPUT SIMRAL					RKPD INPUT SIPD										PPAS/RAPBD INPUT SIPD											
PERANGKAT DAERAH/ BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional		1 - Jumlah kendaran operasional	1 Unit	30.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional	Jumlah Kendaran Operasional	2 unit	69.365.000,00											
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 - Jumlah perlengkapan gedung kantor yang didakan	10 unit	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	10 unit	134.870.806,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penertasan sarana prasarana kantor yang terpuisi	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang didakan	5 Jenis dan 15 Unit/Buah	64.550.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		1 - Jumlah peralatan gedung kantor yang didakan	12 Unit	240.992.296,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	7 unit	252.518.190,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penertasan sarana prasarana kantor yang terpuisi	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang didakan	5 Jenis dan 15 Unit/Buah	0,00
Pengadaan Meubelur		1 - Jumlah meubelur yang didakan	1 Paket	22.547.140,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pengadaan Meubelur	Jumlah meubelur	1 paket	261.608.618,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penertasan sarana prasarana kantor yang terpuisi	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang didakan	3 Jenis dan 7 Unit/Buah	22.727.586,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 - Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jumlah Gedung Kantor	53.530.352,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Gedung Kantor	0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penertasan sarana prasarana kantor yang terpuisi	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Penertasan prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 Unit dan ... M2	5.186.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		1 - Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	121.158.667,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	1 mobil	68.581.312,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penertasan sarana prasarana kantor yang terpuisi	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penertasan prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang didakan	1 Unit	41.183.204,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional		1 - Jumlah kendaran dinas berupa perlengkapan yang dipelihara rutin/berkala	8 Unit	185.273.070,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional	Jumlah kendaran dinas berupa perlengkapan yang dipelihara rutin/berkala	8 kendaraan	115.201.680,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penertasan sarana prasarana kantor yang terpuisi	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penertasan prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaran Dinas/Operasional atau Lapangan yang didakan	9 Unit	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 - Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	7 Unit	27.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 gedung kantor	27.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penertasan sarana prasarana kantor yang terpuisi	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penertasan prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang direhabilitasi	35 Unit	6.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala SIPD		1 - Jumlah Website SIPD yang dipelihara rutin/berkala	1 Web	50.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala SIPD	Jumlah Website SIPD yang dipelihara rutin/berkala	1 Web	50.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penertasan sarana prasarana kantor yang terpuisi	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penertasan prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang direhabilitasi	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
Penyerahan Tanah/Gedung Kantor yang di sewa		1 - Jumlah Tanah/Gedung Kantor yang di sewa	2 Jumlah Gedung Kantor	150.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyerahan Tanah/Gedung Kantor yang di sewa	Jumlah Gedung Kantor yang di sewa	2 gedung	250.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan perlengkapan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1 - Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	180.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	180.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan perlengkapan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
Pengadaan Pakan Dinas Besar/ perlengkapan yang didakan		1 - Jumlah pakan dinas berupa perlengkapan yang didakan	90 Orang	90.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Pengadaan Pakan Dinas Besar/ perlengkapan yang didakan	Jumlah pakan dinas berupa perlengkapan yang didakan	50 set	19.080.650,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan perlengkapan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
Pengadaan Pakan Khusus Hari-Hari Tertentu		1 - Jumlah pakan khusus hari-hari tertentu yang didakan	90 Orang	90.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Pengadaan Pakan Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakan khusus hari-hari tertentu yang didakan	100 set	37.485.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan perlengkapan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 - Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	111.202.590,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	111.202.590,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan perlengkapan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal		1 - Jumlah Pegawai yang mengikuti	5 Orang	52.995.300,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti	10 orang	90.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan perlengkapan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1 - Jumlah Pegawai yang mengikuti	45 Orang	18.246.250,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti	45 orang	22.390.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan perlengkapan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 - Jumlah Pegawai yang mengikuti	50 Orang	30.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti	50 orang	26.718.400,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan perlengkapan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 - Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	275.556.710,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	275.556.710,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penertasan sarana prasarana kantor yang terpuisi	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan perlengkapan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIPD		1 - Jumlah laporan capaian kinerja indikator realisasi kinerja SIPD	3 Dokumen	7.055.719,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIPD	Jumlah laporan capaian kinerja indikator realisasi kinerja SIPD	3 laporan	191.004.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penertasan sarana prasarana kantor yang terpuisi	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan perlengkapan Barang Milik Daerah yang terpuisi	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didakan	2 Unit dan ... M2	120.000.000,00



Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI I										PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI II (PEMUTAKHIRAN)											
RENSTRA PD INPUT SIMRAL					RKPD INPUT SIPD										PPAS/RAPBD INPUT SIPD											
PERANGKAT DAERAH BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1. Jumlah laporan keuangan semesteran	2 dokumen	7.005.700,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	7.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	2 Laporan	1.039.900
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1. Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	7.005.700,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	7.000.000,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	12 Kegiatan dan 1 Laporan	40.692.739
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	1. Jumlah dokumen perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	6 Dokumen	94.680.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	39.033.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	31.333.900	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen		83.222.000,00										
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Sistem	1 Jumlah Sistem	42.920.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	1 orang	42.916.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengupdaten/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengupdaten/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	27.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	1. Jumlah Sistem	1 Jumlah Sistem		42.920.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		3 laporan	0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik Daerah pada SKPD yang dikelola	7 Jenis dan 390 Unit/Barang	27.000.000,00	
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Jumlah Sistem	1 Jumlah Sistem	37.008.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penghitungan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100%	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pengelolaan retribusi yang dilaporkan	12 Laporan	24.600.000,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penghitungan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100%	Pemantauan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi yang ditetapkan	2.358 Objek
Penyusunan LAKP	1. Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penghitungan kompensasi standar	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12 Kegiatan dan 12 Laporan	22.920.000,00	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1. Jumlah Sistem	1 Jumlah Sistem		37.008.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		3 laporan	0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				716.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	17 ASN	2.365.884.572,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyesuaian gaji dan tunjangan	17 Orang	2.313.855.822
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	1. Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98%	320.000.000,00																						
Sosialisasi HAM kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1. Jumlah Pemateri	20 Orang	30.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diabaikan Akses Pembiayaan, Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Dan Fasilitas Pemasaran Online Usaha Mikro Yang Ada	Persentase Usaha Mikro yang Diabaikan Akses Pembiayaan, Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Dan Fasilitas Pemasaran Online Usaha Mikro Yang Ada	10%	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diabaikan Akses Pembiayaan, Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Dan Fasilitas Pemasaran Online Usaha Mikro Yang Ada	Jumlah Pelaku UMKM	250 UMKM	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM	250 Pelaku UMKM	375.449.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1%	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang dibantu pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Pelaku Usaha	Fasilitas Usaha Mikro Mendapat Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang dibantu pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	4500 Pelaku Usaha Mikro	0,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Jumlah Monitoring	20 Kali		20.000.000,00																					
Validasi dan Pemeliharaan Data UMKM	1. Jumlah Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diabaikan Akses Pembiayaan, Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Dan Fasilitas Pemasaran Online Usaha Mikro Yang Ada	Persentase Usaha Mikro yang Diabaikan Akses Pembiayaan, Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Dan Fasilitas Pemasaran Online Usaha Mikro Yang Ada	10%	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diabaikan Akses Pembiayaan, Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Dan Fasilitas Pemasaran Online Usaha Mikro Yang Ada	Jumlah Pelaku UMKM	250 UMKM	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen	1 dokumen	607.472.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1%	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang dibantu pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Pelaku Usaha	Fasilitas Usaha Mikro Mendapat Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang dibantu pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	4500 Pelaku Usaha Mikro	0,00	



Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI I										PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI II (PEMUTAKHIRAN)											
RENSTRA PD INPUT SIMRAL					RKPD INPUT SIPD										PPAS/RAPBD INPUT SIPD											
PERANGKAT DAERAH/ BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
									Koordinasi dengan Para Pemangku																	
Bisnis Usaha Kecil Menengah		1. Jumlah Peserta	70 Orang	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Didaslati Pelatihan Dan Peningkatan Usaha Dibanding Usaha Mikro Yang Ada	1%	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Stela Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	100 Pelaku Usaha	Fasilitas Usaha Mikro Mengikuti Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Peningkatan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang didaslati	250 Pelaku Usaha Mikro	5.089.750.905,00	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1%	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Stela Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	Fasilitas Usaha Mikro Mengikuti Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Peningkatan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang didaslati pengembangan Produk dan Peningkatan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	45000 Pelaku Usaha Mikro	1.132.169.530	
	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Jumlah Sarana pemasaran yang dikembangkan	30 Sarana	100.000.000,00	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Didaslati Pelatihan Dan Peningkatan Usaha Dibanding Usaha Mikro Yang Ada	1%	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Stela Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	100 Pelaku Usaha	Fasilitas Usaha Mikro Mengikuti Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Peningkatan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang didaslati	250 Pelaku Usaha Mikro	0,00											
Pemeliharaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Jumlah Peserta	70 Orang	70.000.000,00																							
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Koperasi	1. Prosentase Koperasi Asat	36,95 %	396.000.000,00																							
Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemertan Perkoprasian		1. Jumlah Peserta	40 Jumlah Peserta	56.000.000,00	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM	Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Dibanding Jumlah Koperasi	50%	Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoprasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota	63 Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Perkoprasian Serta Koperasi dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi	30 Koperasi	274.149.000,00											
		1. Jumlah Peserta	50 Jumlah Peserta	120.000.000,00	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM	Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Dibanding Jumlah Koperasi	50%	Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoprasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota	63 Koperasi	Peningkatan dan Pemahaman Perkoprasian Serta Koperasi dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi	30 Koperasi	0,00											
Peningkatan SDM Pengelola Koperasi Dan Anggotanya	1. Jumlah Koperasi	70 Jumlah Koperasi	70.000.000,00	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM	Program Penguasaan dan Peningkatan Koperasi	Persentase Penguasaan dan Peningkatan Terhadap KSPUSP Koperasi	50%	Pemeriksaan dan Penguasaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Penguasaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	63 Koperasi	Pengawasan Kelekatn, Kesehatan, Kemendiran, Kelengkapan, serta Akutabilitas Koperasi Kewangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Asat	72 Koperasi Asat	71.996.000,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang paitu	48,61%	Pemeriksaan dan Penguasaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang paitu terhadap perubahan perundang-undangan	35 Koperasi	Pengawasan Kelekatn, Kesehatan, Kemendiran, Kelengkapan, serta Akutabilitas Koperasi Kewangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	72 Koperasi Asat	175.367.000,00		
Pembinaan dan Penguasaan		1. Jumlah Koperasi	1 Koperasi	10.000.000,00	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM	Program Penguasaan dan Peningkatan Koperasi	Persentase KSPUSP Yang Didatit Tingkat Kesehatan KSPUSP Koperasi	50%	Pemeriksaan dan Penguasaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Penguasaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	63 Koperasi	Pemeriksaan Keputahan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa	72 Koperasi Asat	10.178.000,00											
				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM	Program Penilaian Kesehatan KSPUSP	Persentase KSPUSP Yang Didatit Tingkat Kesehatan KSPUSP Koperasi	50%	Pemeriksaan dan Penguasaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Penguasaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	63 Koperasi	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi Kewangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Asat	35 Koperasi Asat	15.148.000,00												
Pemberdayaan dan peningkatan peran Desa/Kelurahan Kabupaten Pangandaran	1. Jumlah peserta	70 Orang	140.000.000,00	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Didatit Akses Pembiayaan, Pemasaran, Sistem Baku, Peningkatan Dan Kemitraan Dibanding Jumlah Koperasi	50%	Pemberdayaan dan Peningkatan Koperasi Yang Didatit Akses Pembiayaan, Pemasaran, Sistem Baku, Peningkatan Dan Kemitraan Dibanding Jumlah Koperasi	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Koperasi Yang Didatit Akses Pembiayaan, Pemasaran, Sistem Baku, Peningkatan Dan Kemitraan Dibanding Jumlah Koperasi	63 Koperasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Niat, Tertarik, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelengkapan, Penilaian Manajemen, Standartisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewangan Zona	Jumlah Koperasi	30 Koperasi	137.399.500,00												
Pengembangan			5.286.600.000,00																							
Perdagangan	Program Peningkatan Konsumsi dan Peningkatan Pemasaran Perdagangan	1. Prosentase peningkatan pelaku usaha yang terbit riaga	95%	991.300.000,00																						
	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Peningkatan Konsumsi	1. Jumlah koordias	25 Kali	70.000.000,00																						
	Peningkatan Penguasaan Pemasaran Barang dan Jasa	1. Jumlah Barang dan Jasa yang diawasi	20 Jenis	136.000.000,00	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWASAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	Persentase Peningkatan stabilitas harga sesuai HET	55%	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan	Jumlah Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan	3 Kali	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang	Jumlah Kegiatan Pengawasan	4 Kegiatan	174.219.908,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting	71%	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	21 Barang Pokok	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang	Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang	5 Kegiatan	132.491.791,00	



Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI I										PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI II (PEMUTAKHIRAN)													
RENSTRA PD INPUT SIMRAL					RKPD INPUT SIPD										PPAS/RAPBD INPUT SIPD													
PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
						POKOK DAN BARANG PENTING			Pokok dan Barang Penting	Pokok dan Barang Penting		Integrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					DAN BARANG PENTING	barang yang harganya stabil		Pening di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	yang terkendali harga dan stoknya		Integrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi				
	Operasi Pasar Murah (OPM)	1. Jumlah paket yang disediakan	1500 Paket	60.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penjualan stabilisasi harga sesuai HET	50%	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3 kali	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Paket yang disediakan	5000 Paket	49.129.300,00		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	55%	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	3 kali	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	1 Kegiatan	25.000.000,00	
	Pendataan Dan Pemantauan Barang Berasubdi (LPG, BBM dan Pupuk)	1. Jumlah Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penjualan stabilisasi harga sesuai HET	50%	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubdi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubdi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kali	Pengawasan Penyuluhan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubdi	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	13.584.900,00												
	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kemitraan	1. Jumlah peserta yang mengikuti	0 Peserta	255.300.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan terbit ukur	7%	Pelaksanaan Metodeologi Legal Baku Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metodeologi Legal Baku Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	5 kali	Pengawasan/penyuluhan Metodeologi Legal	Jumlah UTPP yang diawasi	1500 Unit	17.235.000,00												
	Pendampingan Tera Tera Ulang serta pengawasan BERT	1. Jumlah alat yang diura	8000 Alat	300.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan terbit ukur	7%	Pelaksanaan Metodeologi Legal Baku Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metodeologi Legal Baku Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	5 kali	Pelaksanaan Metodeologi Legal Baku Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat yang diura	1500 Unit	358.689.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan terbit ukur	51,28%	Pelaksanaan Metodeologi Legal Baku Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTPP yang diura, ters Ulang, dan Pengawasan	2000 Unit	Pelaksanaan Metodeologi Legal Baku Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan Metodeologi Legal Baku Tera, Tera Ulang	40 Kegiatan	79.745.000,00	
	Pendataan Dan Monitoring Toko Swadaya	1. Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penjualan stabilisasi harga sesuai HET	50%	Mengingat Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Bulan Pokok	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah dokumen	2 dokumen	13.584.900,00												
	Peningkatan Pemahaman Tentang Cukai Begit	1. Jumlah peserta yang mengikuti	500 Orang	150.000.000,00																								
	Facilitas penyelesaian permasalahan permasalahan pemasaran konsumen	1. Jumlah penyelesaian permasalahan pemasaran konsumen	25 Kali	70.000.000,00																								
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1. Persentase Peningkatan Ekspor	15%	205.300.000,00																								
	Promosi Produk yang dipromosikan	1. Jumlah Produk yang dipromosikan	7 Produk	80.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah fasilitas layanan pemasaran produk	2%	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 kali	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk yang dipromosikan	7 Produk	100.038.000,00												
	Solidifikasi Peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Jumlah peserta	350 Orang	75.300.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah fasilitas layanan pemasaran produk	2%	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 kali	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	450 Orang	151.148.900,00												
	Solidifikasi Standar Mutu Produk (SM)	1. Jumlah Peserta	0 Peserta	50.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan ekspor barang	4%	Peningkatan Promosi dan Mutu Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Promosi dan Mutu Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 kali	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	1000 orang	400.647.000,00												
	Program Pembinaan Pedagang Kalimat dan Asean	1. Jumlah PKL dan Pedagang Kalimat yang dibina	2700 Pedagang	60.000.000,00																								
	Kegiatan Pemasaran Mutu Dagang Pedagang Kalimat dan Asean	1. Jumlah Pedagang yang diawasi	20 Pedagang	60.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi yang direvitalisasi/dibangun	19%	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan yang terdampak di wilayah kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan yang terdampak di wilayah kerjanya	2 kali	Pembinaan dan Pengembangan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang yang dibina	2500 pedagang	89.787.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	17,86%	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	75 Orang	Pembinaan dan Pengembangan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	2500 Pedagang	24.360.000,00	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar	1. Persentase Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	28,92 %	4.000.000.000,00																								
	Revisi Pasar	1. Jumlah Pasar	3 Unit	3.900.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi yang direvitalisasi/dibangun	19%	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen	5 dokumen	1.234.700.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	17,86%	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	2 Unit	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Revisi Sarana Distribusi Perdagangan yang dibuat	6 Dokumen	1.400.000.000,00	
	Penyusunan Andal Pasar	1. Jumlah Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi yang direvitalisasi/dibangun	19%	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen	1 dokumen	75.074.000,00	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi									0,00
	Penyusunan DED Pasar	1. Jumlah Dokumen	2 dokumen	200.000.000,00																								0,00



PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI I											PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 VERSI II (PEMUTAKHIRAN)										
RENSTRA PD INPUT SIMRAL					RKPD INPUT SIPD											PPAS/RAPBD INPUT SIPD										
PERANGKAT DAERAH/ BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Penyusunan UKL UPL Peta	1 - Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.000.000,00												PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Pembangunan dan Pengalihan Sarana Distribusi Perdagangan			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		0,00	
	Penyusunan Andal Lain	1 - Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.000.000,00												PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Pembangunan dan Pengalihan Sarana Distribusi Perdagangan			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		0,00	